

TERBIT SETIAP BULAN

EDISI DESEMBER 2021



HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2021

Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi

Korupsi atau rasuah atau mencuri (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan masih sangat rendah. Lembaga pemerintah dinilai sebagai salah satu yang rentan terhadap korupsi. Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu lembaga pemerintah berusaha mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dengan mencanangkan diri sebagai Zona Integritas yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.

Mari kita dukung upaya BIG dalam gerakan anti-korupsi!



Saat ini dapat diunduh melalui www.big.go.id

Tim Redaksi e-Warta Geospasial

Pengarah : Muhtadi Ganda Sutrisna

Penanggung Jawab : Suprajaka

Redaktur : Mone Iye Cornelia Marschiavelli

Editor : Ratih Destarina, Risa Krisadhi

Desain : Muhammad Afif

Juru foto : Achmad Faisal, Ivan Setiawan

Sekretariat : Kesturi Haryunani

Pembuat artikel & distribusi :

Adhy Rahadhyhan, Maya Scoryna,

Tommy Nautico, Bramanto Apriandi,

Maryanto, Hero Hombas, Suranto,

Farrah Leovita.

Sekretariat e-Warta Geospasial

**Bidang Promosi dan Kerja Sama
Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Badan Informasi Geospasial**

**Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong
Jawa Barat 16911**

Email : wartageospasial.big@gmail.com



DEFINISI KORUPSI & KORUPTOR

SECARA BAHASA :

- KORUPSI

PENYELEWENGAN ATAU PENYALAHGUNAAN UANG NEGARA/PERUSAHAAN/ORGANISASI/YAYASAN DAN SEBAGAINYA UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU ORANG LAIN

- KORUTOR

ORANG YANG MELAKUKAN KORUPSI; ORANG YANG MENYELEWENGKAN/MENGGELAPKAN UANG NEGARA/PERUSAHAAN/ORGANISASI/YAYASAN/ DAN SEBAGAINYA DI TEMPAT KERJANYA

SECARA HUKUM :

- KORUPSI

ADA 7 JENIS KORUPSI DALAM 30 PASAL/SUB PASAL: TERKAIT KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA, SUAP-MENYUAP, PENGGELAPAN DALAM JABATAN, PEMERASAN, PERBUATAN CURANG, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN, GRATIFIKASI

- KORUPTOR

ORANG YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA/TERLIBAT PENYUAPAN/PENGGELAPAN/PEMERASAN DALAM JABATAN

Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2021

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211207135746-140-730938/sejarah-hari-antikorupsi-sedunia-9-desember-2021>.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan banyak pihak. Untuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi, ditetapkanlah Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap 9 Desember.

Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati pada 9 Desember ini dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran untuk mengakhiri dampak buruk korupsi.

SEJARAH HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Merujuk laman United Nations (UN), peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau International Anti-Corruption Day melewati proses yang cukup panjang.

Dimulai saat Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyadari dampak kerugian korupsi, sehingga dipandang perlu merumuskan instrumen hukum internasional terkait pemberantasan antikorupsi di tingkat global agar lebih efektif.

"Praktik korupsi sangat melukai perasaan kaum miskin. Korupsi menjadi penyebab utama rusaknya perekonomian suatu bangsa dan menjadi penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan," ujar Sekjen PBB Kofi Annan dalam pidatonya pada 30 Oktober 2003.

Kemudian digelarlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentang korupsi (United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC) pada 31 Oktober 2003, melalui Resolusi 58/4.

Berselang 40 hari kemudian, PBB menyetujui Perjanjian Antikorupsi yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada 9 Desember 2003.

Berdasarkan waktu penandatanganan perjanjian tersebut, sekaligus ditetapkan pula sebagai Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember setiap tahunnya.

Penetapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi serta peran konvensi dalam memerangi dan mencegahnya. Selanjutnya, pada Desember 2005 menjadi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang pertama kali.

Selain meresmikan sebagai Hari Antikorupsi Sedunia, Majelis Umum juga menunjuk pilar PBB lainnya sebagai perwakilan untuk penanggulangan narkoba dan kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

TEMA HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2021

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menyetujui Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember setiap tahun.

Mengutip Antara, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Indonesia mengangkat tema 'Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi'.

Melalui tema tersebut, diharapkan seluruh pihak bersama-sama memperkuat sinergi dan berkolaborasi, baik itu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor usaha, serta organisasi masyarakat, untuk memberantas korupsi melalui perannya masing-masing.

Selain itu, peringatan Hakordia 2021 ini sekaligus untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai dan melakukan pemberantasan korupsi.

PESAN PENTING di HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

"Korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa, oleh sebab itu, harus ditangani dengan extraordinary juga."

"Aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik."

"Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menysasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan."

* Pidato Presiden Joko Widodo/Jokowi Saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia/Hakordia 2021 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, Jakarta, 9 Desember 2021



HARI ANTIKORUPSI
SEDUNIA 2021

KPK

GELAR WICARA ANTIKORUPSI, MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan gelar wicara antikorupsi bertema `Budaya Antikorupsi dalam Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani`. Acara yang dilaksanakan pada Jumat, 30 April 2021 ini dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

“Budaya antikorupsi itu menjadi satu kata penting dan harus

diimplementasikan ke semua hal, khususnya kita sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Antikorupsi itu menjadi salah satu tindak tanduk penting yang harus dilaksanakan setiap hari dalam bentuk perilaku, bahkan dalam hati kita, sehingga menjadi suatu culture (budaya),” kata Inspektur BIG Habib Subagio dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyampaikan rencana menuju WBK dengan lima unit kerja di BIG. Unit yang dimaksud, yaitu Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG), Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik



(PPIT), Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA), Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PIIG), serta Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG).

“ Kita punya komitmen untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi,” tegas Aris.

A cara Gelar Wicara ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana serta Kepala Kantir Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Budi Ali Hidayat selaku penerima apresiasi dari KPK.

Dalam gelaran ini dibahas strategi KPK dalam pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan terkait dengan perorangan, pencegahan berkaitan dengan sistem, dan penindakan berkaitan memberikan efek jera.

Seluruh narasumber menekankan pengembangan budaya integritas dan antikorupsi untuk mewujudkan komitmen bersama agar bebas korupsi. Guna memfasilitasi hal tersebut, BIG telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk melaporkan gratifikasi. (SVY/RKI/NIN)

Penindakan kasus korupsi relatif tidak terbang pilih. Siapa pun jika ditemukan bukti terlibat korupsi, akan ditindak.

KPK juga tetap tegas. Serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan setidaknya jadi bukti bahwa KPK terus bekerja, disamping terus mengintensifkan kerja pencegahan. OTT KPK jadi bukti lembaga ini tidak terbang pilih. Sebagai bukti, OTT KPK terhadap menteri, pihak swasta, para kepala daerah, dan para pejabat dan ASN. Tentunya sebagai salah satu instrumen penindakan OTT harus ditingkatkan terus

DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Reformasi birokrasi yang kini terus dilakukan, menurutnya, tak hanya untuk membuat birokrasi menjadi lincah dan efektif tapi juga untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan transparansi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah beberapa dari sekian ikhtiar komitmen pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI terus di dorong sejak tahun 2014.

Dari tahun ke tahun, unit kerja yang mendapat predikat WBK maupun WBBM terus mengalami peningkatan. Antusiasme juga terlihat sangat tinggi dilihat dari usulan yang disampaikan. Secara rinci, sebanyak 1.459 unit berpredikat WBK dan ada 139 unit berpredikat WBBM.

Aparatur negara dimana pun berada, khususnya para pejabat di kementerian, lembaga, dan pemda diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagaimana mencegah dan menekan praktik korupsi.

Melawan dan memberantas korupsi di lingkungan birokrasi bukan pekerjaan gampang. Tapi ini pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten. Dan yang patut diapresiasi, kini tingkat kepatuhan terhadap strategi pencegahan korupsi kian membaik.

Untuk pembangunan ZI, pelaksanaan aksi ini berjalan sangat baik. Namun terdapat beberapa fokus dalam tubuh pemerintah yang harus terus diperbaiki untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Misal kawasan pelabuhan masih terdapat kendala besar karena masing-masing proses bisnis di antara unit layanan belum terintegrasi dengan baik.

Dalam Stranas PK, mendorong peningkatan layanan pelabuhan dengan mengintegrasikan dan menyederhanakan birokrasi di sepuluh pelabuhan laut utama. Penguatan pengawasan dan akomodir pengaduan masyarakat juga dilakukan.

Fokus pencegahan korupsi juga dilakukan dengan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Beberapa kemajuan signifikan telah berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama yang baik antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penguatan APIP dilakukan dari dua aspek utama yakni kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan independensi dan kinerja APIP dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, sehingga penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Pencapaian lainnya adalah dalam penataan kelembagaan. Akselerasi ini dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi di kementerian, lembaga, dan pemda yang diharapkan selesai pada tahun ini. Tjahjo mengungkapkan, saat ini terdapat 46 ribu jabatan administrasi yang telah dialihkan.

Kemajuan penataan kelembagaan berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama baik antar instansi pemerintah. Sejalan dengan ini perubahan pola pikir ASN dengan penerapan core values ASN BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa. Implementasi BerAKHLAK terus didorong dan diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.

Kehadiran teknologi informasi harus dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Peningkatan integritas aparat penegak hukum juga menjadi fokus dengan memperbaiki dan mempertimbangkan kelayakan kesejahteraan yang memadai.



**Komitmen BLG sebagai zona integritas
(Wilayah Bebas dari Korupsi)**